



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))

- Tahun Sidang : 2020-2021
- Masa Persidangan : V
- Rapat ke : 5 (lima)
- Jenis Rapat : Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan secara tatap muka dan virtual
- Dengan : 1. Menteri Ketenagakerjaan RI;
2. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/tanggal : Senin, 24 Mei 2021
- Pukul : 13.00 WIB – selesai
- Acara : 1. Evaluasi *Link and Match* Balai Latihan Kerja (BLK) dalam memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing;
2. Progres Hasil Pengkajian Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI);
3. Penjelasan penanganan kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam menjawab keresahan masyarakat dimasa pandemi *Covid-19*;
4. Langkah strategi dan koordinasi kesiapan dan penanganan kembalinya Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari negara penempatan khususnya pada masa pandemi *Covid-19* di daerah perbatasan dan basis Pekerja Migran Indonesia (PMI).
- Ketua Rapat : Felly Estelita Runtuwene, SE. / Ketua Komisi IX DPR RI
- Sekretaris Rapat : Suryatna, S.IP./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
- Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Peserta Rapat : A. Fisik 22 orang Virtual 21 orang dari 50 orang
Hadir dan Virtual Anggota Komisi IX DPR RI;
B. Menteri Ketenagakerjaan RI: DR. Hj. Ida Fauziah,
M.Si., beserta jajaran;
C. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI): Benny Rhamdani, beserta
jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan RI dan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dibuka pukul 13.25 WIB., dilaksanakan secara tatap muka dan virtual, sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak kepada Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mengambil kebijakan dalam mengantisipasi keputusasaan PMI pada masa pandemi Covid-19 dan melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam rangka memberikan bantuan bagi pemerintah daerah di daerah keputusasaan PMI hingga PMI tersebut sampai di daerah asal.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk:
 - a. Mengakselerasi transformasi BLK menjadi BLK yang memberikan perluasan lapangan pekerjaan dengan standar kompetensi kerja nasional dan internasional yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan industri di Indonesia secara *link and match*.
 - b. Meningkatkan pengawasan Tenaga Kerja Asing sehingga memberikan transparansi tentang kebutuhan Tenaga Kerja Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Menyusun regulasi perlindungan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia berkoordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan jenis cakupan perlindungan jaminan sosial yang memihak dan berkeadilan bagi PMI sehingga PMI di luar negeri memperoleh perlindungan yang maksimal.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk meningkatkan pemberdayaan PMI purna melalui program dan kegiatan yang memberikan peluang perluasan lapangan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki di daerah asal dengan penambahan anggaran BP2MI.

4. Komisi IX DPR RI akan mengusulkan kepada Pimpinan DPR RI melalui Tim Pengawas Pekerja Migran Indonesia DPR RI untuk melaksanakan Rapat Gabungan Lintas Kementerian guna membahas rencana kepulangan 7300 PMI dari Malaysia.
5. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI untuk:
 - a. Memperhatikan dan memprioritaskan pemberangkatan bagi CPMI yang tertunda keberangkatannya.
 - b. Memfasilitasi pembayaran kompensasi bagi CPMI yang gagal berangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BP2MI memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota pada Raker dan RDP hari ini, disampaikan tanggal 2 Juni 2021.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 19.00 WIB.

Jakarta, 24 Mei 2021

KETUA RAPAT/
KETUA KOMISI IX DPR RI.



FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE.

A-393